

Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Ananto Prabowo^{1*)}, Kharisma Dewi²⁾, Harsono Yoewono³⁾

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Tanri Abeng

³ Program Studi Akuntansi, Universitas Multimedia Nusantara

*Email: anantoprabowo@outlook.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi asosiasi kepemilikan institusional, idependensi dewan komisaris dan ukuran perusahaan pada agresivitas pajak. Penelitian mengambil sampel dari perusahaan publik tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. Metode sampel pada penelitian adalah *purposive sampling* dengan total sampling sebanyak 135. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisa data menggunakan statistik deskriptif dan analisa regresi berganda. Hasil analisa menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Selain itu, komisaris independent dapat membatasi praktek agresivitas pajak meski tidak signifikan. Sedangkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Secara simultan kepemilikan institusional, komisaris independent dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: Agresivitas Pajak, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara terbesar. Penerimaan pajak yang maksimal dapat secara optimal membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, kepatuhan para pembayar pajak sangat mempengaruhi tingkat pendapatan negara dari perpajakan. Para wajib pajak pada umumnya melaporkan kewajiban pajak secara sukarela melalui pelaporan mandiri sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Pendidikan tentang peraturan perpajakan dan pentingnya pajak, harus di diseminasikan seluas-luasnya untuk dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya pajak bagi pembangunan. Pendidikan perpajakan yang rendah dapat dikatakan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Salah satu bentuk pengawasan bagi tindakan manajerial dalam bidang pajak adalah membentuk tata kelola perusahaan yang baik (Wahab et al., 2017). Tata kelola perusahaan

yang baik dalam perusahaan akan sangat diperlukan untuk mengurangi adanya tindakan pengambilan keputusan yang salah, termasuk pengambilan keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya. Unsur dari tata kelola perusahaan (Corporate Governance) adalah kepemilikan institusional dan komisaris independen. Kepemilikan institusional dapat membangun komunikasi yang baik dengan manajemen dan dewan komisaris/direksi sehingga dapat memberikan keseimbangan dalam pengawasan atau monitoring (Wahab et al., 2017). Sedangkan kepemilikan managerial dapat menyeimbangkan antara kepentingan manajemen dan pemegang saham sehingga menghindari terjadinya konflik keagenan, seperti perilaku agresivitas pajak oleh manajer (Steijvers & Niskanen, 2014).

Kepemilikan institusional dan komisaris independen mengambil peran yang cukup besar dalam aktivitas-aktivitas perusahaan sehingga sangat berpengaruh terhadap kebijakan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang kemudian akan berpengaruh besar terhadap kebijakan pajak agresif sebuah perusahaan. Selain kepemilikan institusional dan komisaris independen, ukuran perusahaan juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya *asset* dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Aset memiliki peranan penting terhadap pemanfaatan ketersediaan sumber daya dalam melakukan perencanaan pajak (Kubick & Masli, 2016), termasuk kemampuan melaksanakan agresivitas pajak. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan mengindikasikan semakin besar ukuran perusahaan tersebut dan transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut akan semakin kompleks.

TINJAUAN PUSTAKA

Asimetri informasi itu sendiri adalah ketidaksinambungan informasi yang dimiliki principal dan agen, ketika principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen sebaliknya, agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Asimetri informasi di antara principal (dirjen pajak) dan agen (wajib pajak badan/perusahaan) menimbulkan konflik kepentingan dan menimbulkan biaya agen (Jensen & Meckling, 1976)

Pajak dapat dianggap sebagai beban oleh perusahaan, sehingga perlu dilakukan beberapa strategi untuk mengurangi pajak seperti perencanaan pajak yaitu meminimalkan pajak ter-

hutang untuk mencapai laba yang optimal oleh perusahaan. Definisi tindakan agresivitas pajak menurut (Frank et al., 2009)

“Aggressive tax reporting as downward manipulation of taxable income through tax planning that may or may not be considered fraudulent tax evasion”

Berdasarkan definisi tersebut, selanjutnya (Chen et al., 2010) menjelaskan bahwa agresivitas pajak dapat berupa aktivitas perencanaan pajak yang legal atau masuk kategori yang di ragukan atau area abu-abu serta aktivitas dapat berbentuk illegal. Sehingga agresivitas pajak tidak mengharuskan pada tindakan yang salah dan istilah penggunaan agresivitas pajak dapat digunakan secara bergantian antara penghindaran pajak dan manajemen pajak.

Kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan memiliki peran *monitoring management*, kepemilikan institusional merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan karena sifatnya sebagai pemilik saham mayoritas, selain itu kepemilikan institusional merupakan pihak yang memberikan kontrol terhadap manajemen dalam kebijakan keuangan perusahaan. Monitoring terhadap perusahaan tidak hanya terbatas dilakukan oleh pihak dari dalam perusahaan, namun dilakukan dari pihak eksternal perusahaan terutama investor institutional (Tee & Rassiah, 2019).

Berdasarkan *agency theory* semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik tingkat pengawasan dan mengurangi *agency problem*, komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan pihak manajemen yang berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin saja terjadi (Jensen & Meckling, 1976). Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pembayaran pajak (Putra & Merkusiwati, 2016).

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Boussaidi & Hamed-Sidhom, (2020) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan. Hal ini berimplikasi bahwa semakin besarnya konsentrasi

kepemilikan long-term shareholder maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak agresif. Jadi semakin banyak kepemilikan saham institusional terutama pada saham jangka panjang akan mengurangi praktek penghindran pajak oleh perusahaan karena pemilik saham institusi akan mengawasi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini sejalan dengan teori keagenan dimana pemilik institusional dapat dengan lebih baik mengawasi keputusan manajemen (Jensen & Meckling, 1976)

Kepemilikan institusional yang mendukung kemudahan melakukan penambahan hutang atau memiliki leverage yang tinggi dapat meningkatkan perilaku agresivitas pajak (Huang et al., 2018). Hasil penelitian Prastiwi & Walidah, (2020) juga menunjukkan hasil serupa, dimana kepemilikan institusional tidak mampu mengurangi perilaku agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahab et al., (2017), Ying et al, (2017) dan Boussaidi & Hamed-Sidhom, (2020) menunjukkan kepemilikan institusional dapat menurunkan tindakan agresivitas pajak. Semakin besar proporsi pemegang saham institusi di jajaran pemegang saham perusahaan akan menurunkan praktik agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas maka semakin tinggi kepemilikan institusional akan mengurangi tingkat agresivitas pajak perusahaan yang ditunjukkan melalui tingginya nilai ETR yang merupakan proksi dari agresivitas pajak. Berdasarkan analisis tersebut dan teori keagenan, diharapkan pengawasan dari institusi dapat mengurangi manajer bertindak menyimpang, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh negative dan signifikan terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan teori keagenan semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan pihak manajemen yang berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin saja terjadi (Jensen & Meckling, 1976). Adanya pengawasan yang baik akan meminimalisir tindakan kecurangan yang dilakukan manajemen dalam pelaporan keuangan, dan juga dari sisi pelaporan pajak perusahaan.

Komisaris independen memiliki pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak pada negara berkembang (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2020). Hasil yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara komisaris independen dan agresitas pajak juga di tunjukkan oleh

Muliasari & Hidayat, (2020) dan Romadhina, (2020). Sedangkan penelitian Simorangkir et al, (2018)) mengatakan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, yang memiliki arti bahwa besar kecilnya jumlah komisaris independen tidak membuat praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari. Berbeda dengan hasil penelitian Lanis & Richardson, (2018) yang menunjukkan hasil bahwa komisaris independen yang di proxikan oleh anggota dewan direktur independen berpengaruh negatif pada agresivitas pajak. Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap manajemen sehingga dapat meminimalisir perilaku disfungsi yang dapat terjadi seperti penghindaran pajak. Komisaris independen dapat mengawasi manajemen perusahaan agar dapat mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir perilaku penghindaran pajak yang dapat terjadi. Sehingga keberadaan komisaris independent dapat mengurangi konflik kepentingan dan menghalangi manajer melakukan tindakan agresivitas pajak. Oleh karena itu di harapkan dengan adanya komisaris independent maka masalah keagenan akan berkurang, maka hipotesis yang diharapkan sebagai berikut:

H₂: Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Richardson et al., (2013), Halioui et al., (2016) dan (Deslandes et al., (2019) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar pula untuk membuat perencanaan pajak dengan baik. Perusahaan yang dapat membuat perencanaan dengan baik dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahab et al., (2017) dan Jia & Gao, (2020) yang hasilnya adalah besarnya ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah terkait dengan laba yang mereka peroleh, sehingga perusahaan besar cenderung tidak melakukan agresivitas pajak. Pembayaran pajak akan menjadi salah satu hal yang paling disoroti oleh pemerintah dan masyarakat. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat pengawasan yang harus dilakukan, sehingga akan meningkatkan biaya kea-

genan yang di sebabkan oleh informasi asimetri. Oleh sebab itu, ukuran perusahaan di Indonesia akan sangat berpengaruh terhadap suatu keputusan penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan analisis serta terdapatnya asimetri informasi, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃: Semakin besar ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat di Indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Alasan pemilihan populasi dari perusahaan yang tercatat di Indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia adalah karena saham-saham yang terpilih untuk dimasukkan dalam indeks Kompas 100 ini memiliki likuiditas yang tinggi, nilai kapitalisasi pasar yang besar, dan merupakan saham-saham yang memiliki fundamental dan kinerja yang baik. Sehingga pemilihan sampel dari perusahaan yang tercatat di Indeks Kompas 100 diharapkan dapat mewakili penelitian mengenai agresivitas pajak pada perusahaan besar yang tercatat. Kompas 100 mewakili 74.28% dari total kapitalisasi pasar (Bursa Efek Indonesia, 2019) sehingga diharapkan dapat mewakili perusahaan-perusahaan besar. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel yang ada yaitu:

1. Perusahaan yang tercatat secara konsisten di Indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2018.
2. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.
3. Data berupa laporan keuangan atau laporan tahunan yang tersedia di BEI secara konsisten dan lengkap selama tahun pengamatan.
4. Publikasi laporan menggunakan satuan mata uang Rupiah.

Jumlah sampel dalam penelitian ini di dapat dari jumlah populasi dikurang dengan kriteria-kriteria yang telah penulis paparkan diatas.

METODE PENELITIAN

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variable dependen. Dalam

penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Model regresi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 INST + \beta_2 KI + \beta_3 SIZE + e \quad (5)$$

Keterangan:

ETR = Effective Tax Rate

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

INST = Kepemilikan institusional

KI = Komisaris independen

SIZE = Ukuran perusahaan

E = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang tercatat di Indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014–2018. Tabel 1 menunjukkan jumlah data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Tabel 1. Hasil Penentuan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan yang tercatat secara konsisten di Indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2018	80
2.	Memiliki data yang tidak lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian	(14)
3.	Perusahaan yang tercatat di Indeks Kompas 100 yang tidak mempublikasikan laporan keuangan dan tahunan auditan secara lengkap pada tahun penelitian	(12)
4.	Publikasi laporan yang tidak menggunakan satuan mata uang Rupiah	(15)
5.	Data outlier	(12)
Perusahaan yang memenuhi syarat dan dijadikan sampel dalam penelitian		27
Total Observasi tahun 2014-2018		135

Sumber: Data diolah

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai mean, minimum, maximum dan standar deviasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi

agresivitas pajak, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan ukuran perusahaan. Dari masing-masing variabel tersebut telah dilakukan uji statistik deskriptif dan diperoleh hasil statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

	ETR	INST	KI	SIZE
Mean	0.214646	0.593650	0.400754	30.44442
Median	0.231679	0.594970	0.400000	30.34580
Maximum	0.564722	1.000000	0.600000	33.39963
Minimum	0.001809	0.282799	0.166667	28.11959
Std. Dev	0.110107	0.136059	0.077224	1.274951
Observation	135			

Sumber: Data yang diolah

Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil perhitungan yang didapat pada tabel 2 maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai ETR terkecil 0.001809 yaitu PT Summarecon Agung pada tahun 2015 dan terbesar 0.564722 yaitu PT MNC Investama pada tahun 2017. Nilai rata-rata (mean) ETR pada perusahaan sampel sebesar 0.214646 dengan standar deviasi 0.110107. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel membayar pajak perusahaan sebesar 21,46%, yang artinya pembayaran pajak perusahaan sampel masih belum maksimal, karena masih dibawah batas maksimal (25%), sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan sampel masih melakukan agresivitas pajak.

Kepemilikan Institusional

Pada tabel 2 variabel kepemilikan institusional terlihat bahwa nilai terendahnya 0.282799 yaitu PT Surya Semesta Internusa pada tahun 2017 dan terbesarnya 1.000000 yaitu PT Mitra Keluarga Karyasehat pada tahun 2014, ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional perusahaan sampel terkecil sebesar 28,27% dan terbesar 100% yang artinya seluruh sahamnya dimiliki oleh institusi. Nilai rata-rata (mean) kepemilikan institusional dalam perusahaan sampel adalah sebesar 0.593650 dengan standar deviasi sebesar 0.136059.

Komisaris Independen

Pada variable komisaris independen nilai minimumnya 0.166667 yaitu PT Wijaya Karya Beton pada tahun 2015, dan nilai maksimumnya 0.600000 yaitu PT Global Mediacom. Nilai rata-rata komisaris independen pada perusahaan sampel adalah 0.400754 dengan standar deviasi sebesar 0.077224. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki jumlah dewan komisaris independen sebanyak 40%, yang berarti perusahaan sampel telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BEJ bahwa perusahaan tercatat harus memiliki komisaris independen paling sedikit 30%.

Ukuran Perusahaan

Variabel ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan proksi log total aset. Pada tabel 2 terlihat bahwa nilai minimum variabel ukuran perusahaan adalah 28.11959 yaitu PT Mitra Keluarga Karyasehat tahun 2014 dan nilai maksimumnya 33.39963 yaitu PT Astra International tahun 2018. Nilai rata-rata (mean) ukuran perusahaan dalam perusahaan sampel adalah sebesar 30.44442 dengan standar deviasi sebesar 1.274951. Nilai rata-rata sebesar 30,444 ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan sampel termasuk dalam kategori cukup besar.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variable dependen. Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Berikut ini adalah tabel hasil analisis regresi berganda:

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.593812	0.393224	-1.510110	0.1334
INST	0.086567	0.088121	0.982366	0.3277
KI	-0.003988	0.112505	-0.035448	0.9718
SIZE	0.024920	0.012584	1.980324	0.0478

Sumber: Data yang diolah

Dari hasil analisis regresi diatas diperoleh nilai-nilai dan persamaan regresi sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 INST + \beta_2 KI + \beta_3 SIZE + e$$

$$ETR = -0.593812 + 0.086567 INST - 0.003988 KI + 0.024920 SIZE$$

Tabel 3 menunjukkan variable kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.086567, yang berarti jika variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan sedangkan nilai variabel kepemilikan institusional mengalami kenaikan 1, maka nilai dari variabel ETR akan mengalami kenaikan sebesar 0.086567. Sebaliknya jika nilai variabel kepemilikan institusional menurun 1, maka nilai dari variabel ETR akan mengalami penurunan sebesar 0.086567. Jika dilihat dari nilai probabilitas pada kolom INST yang tertera dalam tabel 3 adalah 0.3277, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi alpha (0.05). Berdasarkan hasil tersebut berarti variabel INST berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini menolak H₁ dimana kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Boussaidi & Hamed-Sidhom, (2020), Wahab et al., (2017) dan Ying et al., (2017) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional mampu menurunkan tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian (Prastiwi & Walidah, 2020) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak” ditolak, artinya bahwa banyak atau sedikitnya jumlah persentase kepemilikan institusional berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Variabel komisaris independen yang ditunjukkan pada tabel 3, memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.003988, yang berarti jika variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan sedangkan nilai variabel komisaris independen mengalami kenaikan 1, maka nilai dari variabel ETR akan mengalami kenaikan sebesar 0.003988. Sebaliknya jika nilai variabel komisaris independen (menurun 1, maka nilai dari variabel ETR akan mengalami penurunan sebesar 0.003988. Nilai probabilitas pada kolom KI di atas adalah sebesar 0.9718, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi alpha (0.05). Dari hasil tersebut berarti variabel komisaris independen tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.

H₂ ditolak, dimana komisaris independen yang berpengaruh secara negative tetapi tidak signifikan, sehingga hasil ini agresivitas pajak tidak konsisten dengan hasil penelitian Boussaidi & Hamed-Sidhom, (2020), Muliastari & Hidayat, (2020) dan Romadhina, (2020) yang mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini yang tidak signifikan walaupun berpengaruh positif, dapat dikatakan tidak mendukung pendapat (Fama & Jensen, 1983) dimana berdasarkan agency theory semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan pihak manajemen yang berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin saja terjadi.

Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan “Komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak” ditolak, artinya bahwa banyak atau sedikitnya jumlah persentase komisaris independen dalam suatu perusahaan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Tabel 3 menginformasikan bahwa variable ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.024920, yang berarti jika variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan sedangkan nilai variabel ukuran perusahaan mengalami kenaikan 1, maka nilai dari variabel ETR akan mengalami kenaikan sebesar 0.024920. Sebaliknya jika nilai variabel ukuran perusahaan menurun 1, maka nilai dari variabel ETR akan mengalami penurunan sebesar 0.024920. Nilai probability pada kolom SIZE sebesar 0.0478, yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikan alpha (0.05). Berdasarkan hasil tersebut berarti variabel SIZE berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.

Hasil penelitian menolak H₃, sehingga hasil tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Jia & Gao, (2020) dan Wahab et al., (2017) yang hasilnya adalah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah terkait dengan laba yang mereka peroleh, sehingga perusahaan besar cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan Deslandes et al., (2019), Halioui et al., (2016) dan Richardson et al., (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki peran dalam meningkatnya aktivitas agresivitas pajak pada suatu perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan “Ukuran perusahaan berpengaruh negative dan signifikan terhadap agresivitas pajak” ditolak, ukuran perusahaan berpengaruh posi-

tif terhadap agresivitas pajak yang artinya semakin besar perusahaan maka akan semakin agresif terhadap pajak. Hasil yang positif dan signifikan dari ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktek agresivitas pajak, di sebabkan oleh semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan memiliki sumber daya yang mumpuni untuk melakukan agresivitas pajak dibandingkan dengan perusahaan berukuran yang lebih kecil.

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi

R-Squared	0.124118	Mean dependent var	0.069717
Adjusted R - squared	0.091108	S.D. dependent var	0.064486
S.E. of regression	0.064127	Sum squared resid	0.538713
F -statistic	1.501752	Durbin-Watson stat	1.780419
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data yang diolah

Dari tabel di atas diperoleh koefisien determinasi atau R-Square sebesar 0.124118 yang artinya sebesar 12,4% variabel dependen dalam model penelitian ini dijelaskan oleh variabel independen seperti kepemilikan institusional, komisaris independen, dan ukuran perusahaan. Sedangkan sisanya ($100\% - 12,4\% = 87,6\%$) dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian ini. Hasil F-Statistik menunjukkan hasil yang signifikan. Sehingga dari hasil koefisien determinasi dapat dikatakan bahwa secara Bersama-sama kepemilikan institusi, komisaris independen dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 135 yang terdiri dari 27 perusahaan yang terdaftar di Kompas 100 BEI selama rentang waktu 5 tahun. Dari hasil analisis statistik deskriptif diperoleh nilai agresivitas pajak yang diprosikan dengan ETR (Effective Tax Rate) memiliki nilai rata-rata sebesar 0.214646 atau 21,46%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel membayar pajak perusahaan sebesar 21,46%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak perusahaan sampel masih belum maksimal, karena masih dibawah batas maksimal (25%), sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan sampel masih melakukan agresivitas pajak. Hasil menunjukkan bahwa dari ketiga variabel independen hanya satu variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak yaitu ukuran perusahaan.

Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan, sehingga hasil tersebut menyatakan bahwa perusahaan yang berukuran besar dan diproxikan dengan total asset memiliki kemampuan untuk melakukan praktek agresivitas pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi kemungkinan terjadinya agresivitas pajak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak karena menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas. Dari nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga hipotesis ditolak yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Secara teoritis penelitian ini berkontribusi terhadap teori keagenan dalam hal agresivitas pajak. Selain itu penelitian memberikan masukan terhadap pembuat kebijakan dan dirjen pajak untuk lebih menitikberatkan pada perusahaan yang tergolong besar atau perusahaan lainnya yang terindikasi melakukan agresivitas pajak. Pemegang saham atau para pemilik mendapatkan dampak dari penelitian ini dengan mengetahui pencapaian kinerja perusahaan melalui laba yang terindikasi melakukan agresivitas pajak akan memperoleh dampak negative dimasa yang akan datang dengan penurunan laba dimasa depan akibat terkena sanksi pajak, maka pengawasan terhadap manajemen dapat ditingkatkan.

SARAN

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel tidak hanya perusahaan yang tercatat di Indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia melainkan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga dapat mewakili keseluruhan perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti, kepemilikan manajerial, likuiditas, komite audit dan lain-lainnya sehingga dapat mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, M. A. N. (2020). Apakah Stock Split Memberikan Keuntungan Tidak Normal? *PERMANA*, 12(1), 9–17. <https://doi.org/10.24905/permana.v12i1.90>

- Amin, M. A. N., & Irawan, B. P. (2021). Apakah Buyback Stock dapat memberikan Keuntungan Tidak Normal saat Pandemi? *PERMANA*, 13(1), 46–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.159>
- Amin, M. A. N., & Ramdhani, D. (2017). ANALYSIS OF ABNORMAL RETURN, STOCK RETURN AND STOCK LIQUIDITY BEFORE AND AFTER BUYBACK SHARE: CASE STUDY OF COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE IN PERIOD OF 2011-2015. *Rjoas*, 11(November), 312–323. <https://doi.org/https://doi.org/10.18551/rjoas.2017-11.37>
- Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2020). Board's characteristics, ownership's nature and corporate tax aggressiveness: new evidence from the Tunisian context. *EuroMed Journal of Business*. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>
- Bursa Efek Indonesia. (2019). *IDX Stock Index Handbook VI.1*.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2019). Audit committee characteristics and tax aggressiveness. *Managerial Auditing Journal*, 35(2), 272–293. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). The Booth School of Business of the University of Chicago The University of Chicago Law School CONTRACTING COSTS AND RESIDUAL CLAIMS : THE SEPARATION OF OWNERSHIP AND CONTROL *. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Halioui, K., Neifar, S., & Abdelaziz, F. Ben. (2016). Corporate governance, CEO compensation and tax aggressiveness: Evidence from American firms listed on the NASDAQ 100. *Review of Accounting and Finance*, 15(4), 445–462. <https://doi.org/10.1108/RAF-01-2015-0018>
- Huang, W., Ying, T., & Shen, Y. (2018). Executive cash compensation and tax aggressiveness of Chinese firms. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 51(4), 1151–1180. <https://doi.org/10.1007/s11156-018-0700-2>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

- Jia, Y., & Gao, X. (2020). Is managerial rent extraction associated with tax aggressiveness? Evidence from informed insider trading. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s11156-020-00898-6>
- Kubick, T. R., & Masli, A. N. S. (2016). Firm-level tournament incentives and corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 35(1), 66–83. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2015.08.002>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2018). Outside Directors, Corporate Social Responsibility Performance, and Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 33(2), 228–251. <https://doi.org/10.1177/0148558X16654834>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (2014).
- Milne, M. J., & Hackston, D. (1996). Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand companies. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 9(1), 77–108.
- Muliasari, R., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 28–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.37403/sultanist.v8i1.183>
- Nur, A. M. A., & Dadan, R. (2017). Analysis of abnormal return, stock return and stock liquidity before and after buyback share: case study of companies listed in Indonesia stock exchange in period of 2011-2015. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 71(11).
- Prastiwi, D., & Walidah, A. N. (2020). Pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan: Efek moderasi transparansi dan kepemilikan institusional. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.2997>
- Putra, I. G. L. N. D. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size Dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), 690–714.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(3), 68–88. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.02.004>
- Romadhina, A. P. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan

- Jasa Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2018). *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(2), 286–298. <https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jama.v4i2.2489>
- Simorangkir, Y. N. L., Subroto, B., & Andayani, W. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jmdk.v6i2.2277>
- Steijvers, T., & Niskanen, M. (2014). Tax aggressiveness in private family firms: An agency perspective. *Journal of Family Business Strategy*, 5(4), 347–357. <https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2014.06.001>
- Tee, C. M., & Rassiah, P. (2019). Ethnic board diversity, earnings quality and institutional investors: evidence from Malaysian corporate boards. *Accounting and Finance*. <https://doi.org/10.1111/acfi.12485>
- Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z. M. (2017). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 424–451. <https://doi.org/10.1108/ARA-05-2016-0053>
- Ying, T., Wright, B., & Huang, W. (2017). Ownership structure and tax aggressiveness of Chinese listed companies. *International Journal of Accounting and Information Management*, 25(3), 313–332. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-07-2016-0070>